



Rumusan DAU Spesifik untuk Tiga Bidang

PUTUSSIBAU - Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes, PP, dan KB) Kabupaten Kapuas Hulu Sudarso, beserta jajaran menghadiri rapat koordinasi teknis bersama pihak Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kapuas Hulu di Ruang Kepala BKAD Kabupaten Kapuas Hulu, Kamis (10/11).

Rapat Koordinasi membahas Rancangan APBD Kabupaten Kapuas Hulu tersebut dipimpin oleh Kepala BKAD Kabupaten Kapuas

Hulu Azmi yang juga selaku ketua Harian TAPD Kabupaten Kapuas Hulu. Rapat koordinasi teknis itu khusus dengan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu, di mana berkaitan dengan Penyesuaian Kebijakan dari Pemerintah Pusat untuk TKDD Tahun 2023 yang akan diselaraskan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 84 Tahun 2022.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BKAD menyampaikan bahwa pada Tahun

2023, Pemerintah Pusat merumuskan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Kabupaten Kapuas Hulu dengan peruntukan spesifik di tiga bidang, salah satunya Bidang Kesehatan.

"Rumusan tersebut mengharuskan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, khususnya Dinas Kesehatan, PP, dan KB melakukan penyesuaian Anggaran Belanja, tanpa harus mengurangi Standar Pelayanan Minimal terhadap Masyarakat dan fokus pada Pengimplementasian Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu di Bidang Keseha-

tan yang berorientasi terhadap sasaran Pembangunan," papar Azmi.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu, Sudarso, menyampaikan pihaknya siap menjalankan rumusan kebijakan tersebut, terkait pemanfaatan Dana Alokasi Umum untuk Kabupaten Kapuas Hulu dengan peruntukan spesifik, salah satunya Bidang Kesehatan.

"Kita juga berupaya dalam penyesuaian anggaran belanja itu nanti tanpa

harus mengurangi Standar Pelayanan Minimal terhadap masyarakat dan fokus pada pengimplementasian visi misi Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu di Bidang Kesehatan, yang berorientasi terhadap sasaran pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu," tegas Sudarso.

Ditambahkan Sudarso, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu juga mendukung SPM, dan tetap selaras dengan Permendagri tentang kodifikasi, nomenklatur keuangan daer-

ah dan Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023,

berupa long list untuk dipilih daerah. (**dRe**)



ISTIMEWA

RAKOR: Rapat koordinasi teknis antara BKAD Kabupaten Kapuas Hulu bersama pihak Dinkes PP KB di Ruang Kepala BKAD Kabupaten Kapuas Hulu, Kamis (10/11).